
PENGELOLAAN ANGKUTAN UMUM PERDESAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG

Zia Nurazizah*¹, Suherman², Lalas Sulastris³

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Jul 12, 2025

Revised Nov 15, 2025

Accepted Nov 30, 2025

Keywords:

Management

Rural Public Transportation

Service Quality

ABSTRACT

This research discusses the management of rural public transportation at the Sumedang Regency Transportation Office. Which is motivated by several main factors related to the needs of rural communities for adequate access to transportation with good quality. This study aims to understand the extent of rural public transport management in improving the quality of rural public transport services and identifying inhibiting factors and efforts made in the implementation of rural public transport management. The research method used was qualitative with descriptive analysis. Informants were determined using purposive sampling technique. Data collection techniques were carried out through literature studies, field studies (observation, interviews, and documentation) and triangulation. After that, validity techniques are credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. Then for data processing using data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results showed that the management of rural public transport involved various parties in planning, organizing, mobilizing, and monitoring. However, in its implementation, there are obstacles such as limited budget, lack of public interest in using rural public transport, and low awareness of transport entrepreneurs to rejuvenate their fleet. Efforts are made by providing subsidies and free feasibility tests for transportation entrepreneurs.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Zia Nurazizah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April Sumedang

Jl. Angkrek Situ No.19 Kelurahan Situ-Sumedang

Email: zianura2003@gmail.com

1. INTRODUCTION

Angkutan perdesaan adalah sarana transportasi umum yang memiliki peranan penting untuk mendukung aktifitas dan mobilitas masyarakat desa, serta mempercepat pemerataan hasil pembangunan terutama pada daerah-daerah pinggiran. Namun angkutan umum di pedesaan seringkali belum dapat memenuhi kebutuhan ini secara optimal, karena masih adanya keterbatasan dalam pengelolaannya, sehingga pelayanan yang diberikan pun kurang maksimal.

Dalam pelaksanaannya angkutan perdesaan terdapat 3 *stakeholders* yang terlibat yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa, pemerintah sebagai regulator atau pengelola, dan penyedia jasa sebagai operator. Penumpang selaku komponen terbesar menghendaki penyelenggaraan angkutan umum dapat berjalan dengan nyaman dan keamanan yang tinggi. Sedangkan operator menghendakan angkutan umum yang dioperasikan dapat berjalan dengan mengangkut penumpang dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Dan pemerintah sebagai regulator dan pengelola memiliki standar pelayanan dalam menciptakan sistem angkutan pedesaan yang baik.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang berperan penting dalam mengelola transportasi umum, termasuk di wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan layanan angkutan umum pedesaan yang baik, perlu adanya kompetensi dan keterampilan yang baik dari pegawai dalam pengelolaan angkutan umum pedesaan. Dengan demikian layanan angkutan umum pedesaan Kabupaten Sumedang dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

Untuk mendorong terwujudnya pengelolaan angkutan umum pedesaan yang baik di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yaitu dengan membuat perencanaan atau rancangan strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengatur sumber daya yang ada seperti kolaborasi antara pemerintah, operator, dan juga pihak lain yang terlibat, memastikan semua rencana dan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, juga melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala. Dengan demikian, dalam upaya peningkatan kualitas layanan angkutan umum pedesaan yang baik, melalui kegiatan pengelolaan yang terstruktur dan terkoordinasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang diharapkan dapat lebih responsif, optimal, dan berkelanjutan.

Namun berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan seperti masih adanya sarana angkutan umum yang tidak layak jalan dan kurang nyaman. Hal ini dibuktikan oleh adanya pengusaha angkutan umum pedesaan yang tidak melakukan *peremajaan* (di ganti atau di perbaharui) pada armada angkutannya. Kemudian minimnya terminal atau tempat pemberhentian bagi angkutan umum pedesaan, serta tidak adanya fasilitas pendukung seperti tempat parkir atau ruang tunggu yang nyaman bagi penumpang. Dan kurangnya regulasi dan penegakkan hukum terhadap jadwal keberangkatan dan pemberhentian bagi angkutan umum pedesaan yang beroperasi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pengemudi yang menunda-nunda keberangkatan, sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi penumpang, terutama yang berada di daerah frekuensi angkutan rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menguraikan ke dalam fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan angkutan umum pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
2. Faktor yang menghambat pengelolaan angkutan umum pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang; dan
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor yang menghambat pengelolaan angkutan umum pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

Menurut Terry (dalam Silalahi, 2009: 136) mengemukakan bahwa “Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumberdaya lainnya”.

Pengelolaan ini dalam pelaksanaannya dapat diukur dengan beberapa faktor atau fungsi. Menurut Terry (dalam, Silalahi, 2009: 165) mengemukakan empat fungsi dasar manajemen atau pengelolaan, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organization*)
3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pelaksanaan pengelolaan angkutan umum pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang menghadapi tiga faktor penghambat menurut Zulfikar (Zulfikar, 2010: 12) yaitu:

1. Sarana
2. Prasarana
3. Peraturan atau Regulasi

Dengan adanya permasalahan diatas maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan kualitas layanan angkutan umum pedesaan. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penggunaan transportasi publik terutama angkutan umum pedesaan. Kemudian layanan angkutan umum pedesaan yang baik, dapat mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat juga menjamin keamanan dan

keselamatan pengguna. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang agar dapat meningkatkan kualitas layanan angkutan umum perdesaan di Kabupaten Sumedang.

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Menurut Sugiyono (2017: 9), metode kualitatif adalah “Penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, Studi Lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi mengolah data hasil wawancara dan observasi, penelitian melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan mengacu kepada Teknik analisis dan model Miles dan Huberman (Sugiyono 2017:246-252) yaitu *Data reduction* (reduksi data), *Data display* (penyajian data), *Conclusion drawing/Verification* (pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi), dan Triangulasi (gabungan). Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang didapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, sehingga dapat memiliki kredibilitas yang tinggi agar tujuan penelitian dapat tercapai.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Angkutan umum perdesaan adalah angkutan yang melayani perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten, khususnya di wilayah perdesaan, dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tertentu dan tidak termasuk dalam trayek kota di wilayah ibu kota kabupaten. Dalam ini peneliti akan melakukan pembahasan mengenai pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan faktor penghambat serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dari pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

Mengenai pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang peneliti menggunakan teori Menurut Terry (dalam, Silalahi, 2009: 165) dengan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organization*)
3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pembahasan mengenai faktor penghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengelolaan peneliti menggunakan menurut Zulfikar (Zulfikar, 2010: 12) yaitu:

1. Sarana
2. Prasarana
3. Peraturan atau Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara dari empat informan, maka didapatkan gambaran mengenai pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang berdasarkan dimensi-dimensi dalam pelaksanaan pengelolaan angkutan umum perdesaan sebagai berikut.

Pengelolaan Angkutan Umum Perdesaan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

1. Perencanaan

Dimensi perencanaan menunjukkan bahwa pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ini sudah cukup baik dilihat dari indikator sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pengaturan Trayek, pada indikator ini mengacu pada dasar hukum yang kuat, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2012 serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2015, yang mana proses ini juga terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan pengusaha angkutan, sehingga mencerminkan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan angkutan umum perdesaan.
- b. Perencanaan Pengembangan Terminal, yang mana perencanaan didasarkan pada kajian teknis yang komprehensif oleh berbagai instansi termasuk bappeda dan Dinas PU. Namun hingga kini belum ada pengembangan terminal baru karena rendahnya minat terhadap angkutan umum perdesaan.

c. Pengangggaran Biaya Pengelolaan, dialokasikan untuk pembangunan tempat pemberhentian, juga untuk biaya KIR uji kelayakan, dan pengawasan kartu diberikan gratis sesuai Peraturan Kementerian Perhubungan Tahun 2021.

2. Pengorganisasian

Dimensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sudah cukup baik, meskipun harus tetap ada evaluasi dan juga perbaikan yang jelas didalamnya. Dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

a. Koordinasi Multi Pihak, seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI, Dinas PU, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Organda, dan KKU telah berjalan secara efektif melalui pelaksanaan operasi gabungan rutin, penertiban KIR, serta perbaikan jalan selama dua tahun terakhir.

b. Penetapan Rute dan Jadwal, yang mana penjadwalan keberangkatan dan kedatangan angkutan umum perdesaan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan di lapangan, di mana jadwal keberangkatan ditentukan secara fleksibel oleh masing-masing sopir atau kelompok kerja tanpa adanya pengaturan waktu yang spesifik

3. Penggerakan

Dimensi penggerakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sudah cukup baik, meskipun harus tetap ada evaluasi dan juga pengaturan yang jelas didalamnya. Dilihat pada indikator sebagai berikut:

a. Ketersediaan Layanan, angkutan perdesaan di Kabupaten Sumedang telah tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun pemanfaatannya rendah karena masyarakat terutama pelajar lebih memilih kendaraan pribadi atau menggunakan ojek online.

b. Peningkatan Layanan, angkutan perdesaan perlu diimbangi dengan peningkatan minat masyarakat, yang belum tercapai meskipun tarif telah diturunkan.

c. Pemeliharaan Berkala, pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang berkomitmen menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang dengan menerapkan uji kelayakan berkala, pengawasan izin operasional dengan gratis.

4. Pengawasan

Dimensi pengawasan menunjukkan bahwa pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sudah cukup baik, meskipun harus tetap ada evaluasi, perbaikan, juga kebijakan yang jelas didalamnya. Dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:

a. Pemantauan Kinerja Operator, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang menjalin kerja sama dengan organda, membentuk kelompok kerja (pokja), dan menugaskan petugas lapangan untuk melakukan pemantauan secara langsung, pengumpulan data operasional serta evaluasi kondisi di lapangan juga terus dilakukan sebagai bagian dari proses pengawasan.

b. Evaluasi Rutin terhadap Rute dan Trayek, yang mana evaluasi layanan angkutan perdesaan mencakup trayek, administrasi dan kualitas layanan. Meskipun evaluasi trayek yang seharusnya dilakukan setiap 6 bulan belum dilakukan secara menyeluruh sejak tahun 2015. Sehingga perlu adanya penjadwalan ulang bagi evaluasi rute dan trayek secara rutin.

Hambatan Pengelolaan Angkutan Umum Perdesaan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

1. Sarana

Dimensi sarana ini menjadi faktor yang penting dalam pengelolaan angkutan umum perdesaan. Dalam dimensi sarana dalam pengelolaan angkutan umum perdesaan masih kurang baik karena adanya hambatan yang timbul dalam pengelolaan angkutan umum perdesaan dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:

a. Kondisi Fisik, yang mana masih menunjukkan terjadinya hambatan atau kendala terutama dalam usia kendaraan angkutan umum perdesaan yang sudah melebihi 10 tahun cenderung memerlukan biaya yang tinggi untuk pemeliharaan, kendaraan dengan usia tua dan tidak terawat ini juga meningkatkan risiko kerusakan mesin, dan kecelakaan.

b. Kapasitas Angkutan, minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum perdesaan di Kabupaten Sumedang menurun, yang mana berdampak langsung pada penurunan pendapatan pengusaha angkutan, dan bahkan menyebabkan para pengusaha angkutan menjual kendaraannya untuk menutupi kerugian.

2. Prasarana

Dimensi prasarana ini menjadi faktor yang penting dalam pengelolaan angkutan umum perdesaan. Dalam dimensi prasarana dalam pengelolaan angkutan umum perdesaan masih kurang baik karena adanya hambatan yang timbul dalam pengelolaan angkutan umum perdesaan. Dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:

a. Kondisi Jalan, yang mana kondisi jalan yang rusak akibat faktor cuaca dan bencana alam juga kurangnya drainase yang memadai dan kendaraan yang melebihi kapasitas memperparah situasi tersebut. Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama yang mempengaruhi kondisi.

b. Terminal atau Halte, disebabkan oleh rendahnya prioritas pemerintah, serta rendahnya kedisiplinan pengemudi, menyebabkan fasilitas yang ada tidak digunakan secara optimal dan pelayanan angkutan umum menjadi tidak teratur.

3. Peraturan atau Regulasi

Dimensi peraturan atau regulasi ini menjadi faktor yang penting dalam pengelolaan angkutan umum perdesaa. Dalam dimensi peraturan atau regulasi pengelolaan angkutan umum perdesaan masih kurang baik karena adanya hambatan yang timbul dalam pengelolaan angkutan umum perdesaan. Dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:

- a. Standar Kendaraan, di Kabupaten Sumedang mengalami hambatan akibat keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman dan kesadaran pemilik angkutan, tingginya beban operasional serta kurangnya koordinasi dan infrastruktur pendukung.
- b. Penetapan Tarif, angkutan umum perdesaan juga menghadapi kendala, terutama saat terjadi kenaikan harga BBM dan rendahnya minat masyarakat, sehingga tarif ditentukan berdasarkan jarak tempuh sering disesuaikan agar tetap terjangkau tanpa mengorbankan biaya operasional.
- c. Peraturan Keselamatan, menghadapi kendala seperti rendahnya pemahaman pengemudi tentang standar kendaraan serta terbatasnya fasilitas keselamatan seperti kotak P3K dan alat pemadam kebakaran. Kemudian masih adanya pengemudi yang tidak mematuhi kewajiban KIR meskipun layanan tersebut sudah di gratiskan, dan regulasi yang tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan.

Upaya dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Angkutan Umum Perdesaan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

1. Sarana

Dalam mengatasi hambatan dimensi sarana menunjukkan hasil cukup baik, meskipun harus tetap ada upaya yang lebih optimal di dalamnya. Dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:

- a. Kondisi Fisik kendaraan yaitu adanya upaya subsidi tambahan dari pemerintah, termasuk untuk peremajaan kendaraan
- b. Kapasitas Angkutan Pemerintah dan Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan subsidi, sosialisasi, dan imbauan kepada pengusaha angkutan. Namun minat masyarakat terhadap angkutan umum perdesaan tetap rendah.

2. Prasarana

Dalam mengatasi hambatan dimensi prasarana menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun harus tetap ada upaya yang lebih optimal di dalamnya. Dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:

- a. Kondisi Jalan adanya ketentuan kelas jalan agar kendaraan tidak melebihi kapasitas, terutama untuk kendaraan bermuatan berat.
- b. Terminal atau Halte masih kurang baik karena keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran supir dan penumpang sehingga terminal atau halte bagi angkutan umum perdesaan belum dapat digunakan dengan optimal.

3. Peraturan atau Regulasi

Dalam mengatasi hambatan dimensi peraturan atau regulasi menunjukkan hasil cukup baik. Dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:

- a. Standar kendaraan, adanya pemberian fasilitas gratis seperti kir dan kartu pengawasan sehingga dapat mendorong kepatuhan terhadap standar kendaraan.
- b. Penetapan Tarif, adanya peninjauan tarif angkutan mengacu pada perubahan harga BBM, dengan evaluasi berkala melalui kajian biaya, survei, dan koordinasi.
- c. Peraturan Keselamatan adanya edukasi, inspeksi berkala, dan kerjasama dengan kepolisian serta Organda sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan.

Berdasarkan pemaparan hasil di atas, maka peneliti menemukan temuan pada penelitian tersebut yaitu terletak pada pengelolaan angkutan umum perdesaan dengan fokus pada dimensi perencanaan, permasalahan utama yang diangkat dari dimensi perencanaan adalah belum ada pengembangan terminal baru karena rendahnya minat terhadap angkutan umum perdesaan, sehingga penggunaan terminal tipe C kurang optimal. Kemudian pada dimensi pergerakan yang mana dalam ketersediaan layanan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, namun keterbatasan fasilitas terminal dan perkembangan transportasi berbasis aplikasi (*ojek online*) mempercepat pergeseran preferensi masyarakat dari angkutan umum ke kendaraan pribadi. Sehingga kebijakan yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan optimal.

Temuan penting lainnya adalah dalam segi pengawasannya, pengelolaan angkutan umum perdesaan ini masih lemah dari sisi evaluasi rute dan trayek angkutanannya. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh belum dilakukan sejak 2015. Sedangkan idealnya dilakukan setiap 6 bulan sekali, untuk kegiatan survei atau monitoring lapangan sebagai bentuk evaluasi terhadap kondisi layanan angkutan umum perdesaan, sehingga kualitas layanan angkutan umum perdesaan dapat meningkat.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa pengelolaan angkutan umum perdesaan masih menghadapi beberapa hambatan, dalam sarana, prasarana, dan peraturan atau regulasi, yang mana diperlukan upaya yang optimal dalam mengatasi hambatan terus, agar dapat meningkatkan pelayanan angkutan umum perdesaan di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang memegang peranan penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat desa serta mendukung akses terhadap layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan angkutan umum perdesaan di Kabupaten Sumedang diatur melalui SK Bupati dengan melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasannya. Koordinasi antara instansi terkait berjalan efektif, sementara upaya pembenahan terminal dan pengembangan regulasi terus dilakukan guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perdesaan. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan menjadi fokus untuk memastikan layanan semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan angkutan umum perdesaan yaitu rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perdesaan dan kurangnya kesadaran pengusaha angkutan terhadap peraturan keselamatan bagi penumpang. Selain itu, hambatan internal berupa kurangnya anggaran yang diberikan untuk menunjang kegiatan operasional angkutan umum perdesaan, sehingga tidak adanya pengembangan terminal tipe C di Kabupaten Sumedang.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan terkait pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yaitu dengan adanya layanan KIR gratis bagi pengusaha angkutan, dan juga edukasi kepada pengusaha angkutan dan informasi di KIR mengenai batasan jumlah penumpang ideal juga bertujuan menjaga kondisi jalan agar tetap baik. Selain itu dengan mengadakan kegiatan operasi gabungan antara Dinas Perhubungan dengan pihak Kepolisian dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan lalu lintas dengan memastikan kendaraan angkutan umum memenuhi standar kelayakan teknis dan administrasi yang berlaku, serta memberikan edukasi kepada pengemudi serta pemilik angkutan agar mematuhi peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan angkutan umum perdesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu adanya kebijakan dan evaluasi yang efektif dalam pelaksanaannya. Sehingga, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi kurangnya pengembangan terminal tipe C di Kabupaten Sumedang dan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perdesaan guna meningkatkan kualitas layanan angkutan umum perdesaan yang optimal.

REFERENCES

- Khaisara, D., Kartikowati, S., & Trisnawati., F. (. (n.d.). *The Effect Of Facilitie/Infrastructure And Organization Commitment To Employees Performance In PT. Suri Senia, Pmks Talikumain Rokam Hulu.*
- Silalahi, U. (2009). *Studi tentang Ilmu Administrasi.* Bandung: Percetakan Sina Baru Algensindo Offset.
- Silalahi, U. (2011). *Asas-Asas Manajemen.* Bandung: Refika Adimata.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Syelviani, M. (2019). Pentingnya Sarana Dan Prasarana Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Puskesmas Teluk Pinang. Vol. 5, Issue 2.
- Terry, G. (2003). *Principles Of Management.* Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Zulfikar, S. (2010). *Transportasi: Suatu Pengantar.* Jakarta: UI Press.